

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) No. COM/001/01/1215 terbit tanggal 1 Desember 2015 yang merupakan *up dating* dari Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola pada Bank, adalah sebagai berikut:

- A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- D. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- E. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2017 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi *audit intern*;
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/019/0118 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II/2017, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai dengan Profil Risiko semester II/2017 dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester II/2017.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-47/PB 311/2016 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, menegaskan bahwa Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat BI No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
 - b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
 - c. Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
4. Tidak ada Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK, semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	5	5	100%
2	Hari Sugiharto	5	5	100%
3	Winadewi Hanantha	5	5	100%

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2017. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 tertuang pada Akta No. 88 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 29 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2016.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit *intern* Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.
7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/003/0817 tanggal 25 Agustus 2017, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2016 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/001/0117 tanggal 27 Februari 2017.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi Anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih dalam koridor ketentuan OJK.

a. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 Tanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto 2. Dr. Timotius 3. Edy Sukarno	Komisaris Independen Pihak Independen Pihak Independen

Pengangkatan Anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas *Internal Audit Group*;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan *Internal Audit Group*, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	5	5	100%
Hari Sugiharto	5	5	100%
Dr. Timotius	5	2	40%
Edy Sukarno	5	5	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 20 Maret 2017 adalah pembahasan *Closing Meeting Audit* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young.
- 3) Agenda rapat tanggal 30 Maret 2017 adalah pembahasan hasil Audit periode Januari s.d Maret 2017.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- 4) Dalam Rapat tanggal 5 September 2017, dilakukan Pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku 2017. Komite merekomendasikan KAP Purwantonono, Sungkoro & Surja yang berafiliasi dengan *Ernst & Young*.
- 5) Dalam Rapat tanggal 5 September 2017, dilakukan Pembahasan Aktivitas Audit April s.d Agustus 2017.
Terkait migrasi *Core Banking* baru T 24, komite menyarankan agar dibuat laporan tentang permasalahan atau kendala yang terjadi pasca migrasi *Core Banking*, Solusi dan progress penyelesaiannya.
- 6) Agenda rapat tanggal 13 Desember 2017 adalah pembahasan aktivitas audit September s.d November 2017, diantaranya audit KC Semarang, KC Pasar Minggu, KCP Kelapa Gading, KK UKI dan Audit Khusus terkait Penutupan KC Lumajang.
- 7) Komite Audit meminta agar ditetapkan penanggung jawab untuk tugas *Review* Kebijakan dan Prosedur.

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tanggal 29 Juni 2012 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Pemantau Risiko", dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Winadewi Hanantha 3. Dr. Timotius 4. Edy Sukarno	Komisaris Utama Independen Komisaris Pihak Independen Pihak Independen

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko; dan
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	4	4	100%
Birawa Natapradja	4	3	75%
Winadewi Hanantha	4	4	100%
Dr. Timotius	4	2	50%
Edy Sukarno	4	4	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Hasil pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank.
Peringkat Risiko Komposit Bank di Triwulan III/2017 dinilai dalam Peringkat 2 atau "*Low to Moderate*".
- 3) Tingkat Kesehatan Bank
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank per posisi Juni dan Desember 2017 dinilai "Sehat" dengan penilaian Profil Risiko dinilai "*Low to Moderate*"; GCG dinilai "Baik"; Rentabilitas dinilai "Cukup Baik" dan Permodalan dinilai "Sangat Baik".
- 4) Komite Pemantau Risiko juga merekomendasikan:
 - a) Agar dilakukan pemenuhan kewajiban penyusunan *action plan* persiapan penerapan PSAK 71 sesuai Surat OJK No. S-110/PB.31/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
 - b) Perlu peningkatan kontrol terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan *by system* dan upaya pengelolaan atas penyelesaian masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan implementasi *core banking system* yang baru.
 - c) Perlunya Peningkatan Sistem Pengendalian *intern* baik dalam aktivitas perkreditan maupun oprasional untuk mencegah terjadinya *fraud*.
 - d) Untuk menghindari potensi risiko terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada pihak eksternal, maka setiap pelaporan diupayakan agar disampaikan sebelum *date line* penyampaian laporan.
 - e) Proses identifikasi dalam pelaksanaan *self assessment* penilaian profil risiko agar dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat lebih meningkatkan keakuratan dalam menentukan penilaian profil risiko.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/013a/1215 Tanggal 1 Desember 2015 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Remunerasi dan Nominasi", dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Winadewi Hanantha 3. Agnes Sri Lestari	Komisaris Utama Independen Komisaris Perwakilan Karyawan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dan pengaturan rapat, yakni Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/01/1215 terbit tanggal 1 Desember 2015.

Dalam mengatur pelaksanaan remunerasi, Bank berpedoman pada Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216 terbit tanggal 19 Desember 2016. Latar belakang penyusunan Kebijakan ini adalah karena adanya Dinamika perekonomian nasional dan global sehingga dirasa perlu meningkatkan ketahanan antara lain melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi berpotensi meningkatkan risiko, sehingga harus dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Adapun tujuan penerbitan kebijakan remunerasi tersebut adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga; dan sebagai acuan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang diakibatkan karena pemberian remunerasi yang berlebihan oleh pengambil keputusan.

Bank dalam penunjukan *Material Risk Takers* (MRT) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjuk Direksi dan *Business Group Head* karena berkaitan langsung dalam pemberian kredit. Saat ini risiko utama Bank adalah risiko kredit karena kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank bersumber dari kredit, sehingga dalam hal pemberian remunerasi mendapatkan porsi yang lebih.

Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi terbit pada 19 Desember 2016 dan diterapkan sejak tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor cabang, karena masing-masing wilayah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Begitu pula dengan pencapaian kinerja bisnis juga memengaruhi remunerasi.

Salah satu komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Remunerasi adalah penilaian kinerja individu yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahun, disamping itu kinerja unit kerja/ kantor cabang dan Bank secara keseluruhan, ikut memengaruhi Remunerasi. Bagi karyawan yang penilaian kinerjanya tidak baik/ target kerja tidak tercapai maka akan ada *adjustment* atas remunerasi yang diterima. Besaran *adjustment* bervariasi tergantung seberapa besar pencapaiannya. Kedepannya Bank akan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

mengevaluasi pelaksanaan dan melakukan kaji ulang kebijakan Remunerasi tersebut karena disadari masih ada ruang untuk disempurnakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon Anggota Direksi dan/atau calon Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir	Remunerasi dibayarkan Tahun 2017 (dalam jutaan Rp)
Hari Sugiharto	7	7	100%	1.897
Birawa Natapradja	7	7	100%	
Winadewi Hanantha	7	7	100%	
Agnes Sri Lestari	7	7	100%	

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Komite mengusulkan kenaikan gaji karyawan tahun 2017 dijalankan bulan April 2017 dengan rapel dari bulan Januari 2017. Usulan kenaikan gaji karyawan agar memperhatikan BOPO dan kemampuan keuangan perusahaan. Untuk memberi motivasi kepada karyawan, agar memperhatikan usulan kenaikan *grade* bagi karyawan yang berprestasi.
- 3) Komite mengusulkan penyesuaian benefit kesehatan karyawan dan kebijakan lembur karyawan.
- 4) Komite mengusulkan kenaikan gaji untuk Pengurus untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.
- 5) Komite mengusulkan bagi karyawan yang mempunyai peran lebih dalam proses migrasi *core banking* agar diberikan penghargaan atau apresiasi yang terpisah dari insentif.
- 6) Komite mengusulkan Pemberian Insentif diberikan secara bijaksana dan adil sehingga bisa lebih diterima oleh karyawan. Insentif karyawan tahun 2017 telah dibagikan kepada karyawan pada tanggal 24 Juli 2017.
- 7) Komite mengusulkan untuk membuat kebijakan terkait remunerasi Pejabat Bank mengenai gaji *gross/net* maupun tunjangan jabatan yang melekat pada jabatan.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi, dapat dilihat antara lain:

1. Untuk lebih mendorong pertumbuhan bisnis khususnya Dana Pihak Ketiga dan Kredit, maka perlu adanya dukungan jumlah dan kualitas SDM yang lebih memadai guna mendapatkan kredit dengan kualitas yang baik melalui pemberian kredit yang sehat. Untuk itu perlu menambah SDM bidang marketing (*direct revenue*) untuk ditempatkan di sejumlah kantor cabang tertentu. Selain itu mengingat jumlah kredit bermasalah *relative* tinggi (NPL *Gross* sebesar 3,14% per posisi 31 Desember 2016) maka perlu upaya-upaya penyelesaian kredit yang lebih komprehensif di samping peningkatan fungsi *internal control* serta meningkatkan fungsi kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.
2. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 April 2017, Anggota Rapat secara aklamasi menunjuk Bpk. Birawa Natapradja sebagai Pimpinan RUPST yang akan diselenggarakan tanggal 29 Mei 2017.
3. Mencermati Penerapan Program APU PPT, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah:
 - a. Mengingat bahwa tingkat kejahatan perbankan khususnya yang terkait dengan *cyber crime* menunjukkan adanya kecenderungan meningkat akhir-akhir ini, maka pengawasan terhadap debitur melalui *monitoring* transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah perlu kecermatan yang lebih mendalam.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- b. Kenyataan saat ini para pelaku kejahatan perbankan yang sebelumnya lebih memanfaatkan bank-bank besar yang digunakan untuk melakukan transaksi kejahatan, saat ini bank-bank kecil juga sudah mulai digunakan.
 - c. Dengan semakin besar suatu bank, maka transaksi akan semakin kompleks dan banyak, sehingga hal ini semakin rawan terhadap kejahatan perbankan, untuk itu maka *up dating system* perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mampu mendeteksi transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan.
4. Perlu adanya kesiapan dan peningkatan kompetensi karyawan khususnya di bidang produk/layanan *digital* seiring dengan rencana Bank menuju era *digital banking*.
 5. Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis yang sehat, maka beberapa hal yang perlu menjadi *concern* manajemen diantaranya:
 - a. Menekan tingkat NPL yang masih menunjukkan rasio yang relatif tinggi melalui penyelesaian kredit bermasalah, terutama kredit program yang disalurkan melalui perusahaan *Multi Finance*.
 - b. Meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit baru ke sektor yang dianggap aman dan eksis di tengah kondisi ekonomi yang belum kondusif.
 - c. Melakukan *monitoring* kredit secara memadai antara lain dengan analisa secara berkala terhadap penggunaan fasilitas kredit, penyampaian laporan keuangan, penyampaian daftar jaminan piutang dan kunjungan usaha debitur, serta pemeriksaan secara *sampling BPKB end user*.
 - d. Meningkatkan pengawasan terhadap kredit dalam perhatian khusus yang beberapa bulan terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat supaya tidak menjadi NPL.
 - e. Meningkatkan internal kontrol khususnya terkait dengan proses indentifikasi dan analis dalam pemberian kredit termasuk dalam pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai *underlying* dalam pemberian kredit tersebut.
 - f. Pentingnya dilakukan pengamatan yang jeli dan cermat atas sektor-sektor usaha yang berprospek baik sebagai dasar untuk digarap serta sasaran pemberian kredit ke depan.
 6. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 September 2017, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- 000 -

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

OJK melalui surat No. S-47/PB 311/2016 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, menegaskan bahwa Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - a. Edy Kuntardjo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat BI No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 9 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - b. Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat BI No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
 - d. Josavia Rachman Ichwan disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Bisnis melalui Surat OJK No. SR-65/D.03/2016 tertanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank Ina Perdana dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/01/1215 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang:
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun Buku 2016 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2017. Pelaksanaan tugas Tahun Buku 2016 tertuang pada Akta No. 88 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 29 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2016.

2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari *Internal Audit Group*, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

- a. Pengarahan Direksi

Pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific – Jl. M.H. Thamrin, Jakarta diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “Kinerja 2016 & Konsolidasi Internal” dihadiri oleh Pengurus Bank dan semua Pimpinan Cabang dan Capem, *Group Head* serta Pimpinan Unit Kerja. Dalam Acara Raker ini, Bp Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) memberi pengarahan kepada Peserta Raker, antara lain:

- 1) Sehubungan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan PUT II maka proses tahapan Bank untuk menjadi Bank BUKU 2 telah dipercepat dari target semula tahun 2019, namun sudah terealisasi pada tahun 2017. Susunan pemegang saham Bank mengalami perubahan sebagaimana dengan susunan pemegang saham mayoritas adalah PT. Indolife Pensiortama sebesar 22,47%. Sampai dengan saat ini PSP Bank adalah PT. Philadel Terra Lestari (9,64%) dan sebagai PSPT adalah Bp. Pieter Tanuri dan Bp. Oki Widjaja (1,93%).
- 2) Sebagai evaluasi atas kondisi yang terjadi selama tahun 2016, Dirut juga menekankan perlunya peningkatan internal *control* melalui: pelaksanaan kerja yang sesuai dengan SOP; menghindari kesalahan berulang; pelaksanaan *check and recheck* dalam aktivitas transaksi; dan peningkatan kualitas supervisi cabang melalui kedisiplinan Kepala Cabang dalam memonitor kondisi kantor serta pelaksanaan *meeting per unit kerja/cabang* setidaknya sebulan sekali.
- 3) Mengantisipasi terjadinya peningkatan *operational risk* dan maraknya kasus *fraud* di dunia perbankan, Dirut berpesan agar proses *Know Your Employee* dapat ditingkatkan. Supervisor diharuskan untuk memperhatikan *life style* karyawan, meningkatkan sistem pengendalian *intern*, dan memastikan setiap karyawan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam bekerja.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- 4) Dirut menyampaikan perlunya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, dan kredit harus tumbuh agar Bank tetap dalam kondisi sehat. Sementara itu NPL harus diantisipasi dengan *monitoring* dan proses *collection* yang ketat.
- 5) Dirut juga memberikan penekanan pada perlunya perbaikan SLA dalam proses pengajuan dan perpanjangan kredit. Unit Kerja Sisdur telah menyusun prosedur yang mengatur ketentuan mengenai perpanjangan fasilitas kredit yang dapat dijadikan sebagai acuan kerja. Koordinasi dan konsolidasi melalui komunikasi yang baik dalam proses transaksi kredit akan meningkatkan saling kepercayaan untuk pemberian kredit yang sehat.
- 6) Tingkat kesehatan Bank harus dapat dipertahankan pada predikat “Sehat”. Salah satu aspek penting untuk menjaga tingkat kesehatan adalah kredit harus tetap tumbuh secara sehat, dengan rasio LFR sesuai saran dari OJK yaitu minimal sebesar 80%. Selain itu agar *asset* tetap tumbuh, maka dari sisi *liabilities*, *funding* harus ditingkatkan.
- 7) Sebagai tambahan arahan di atas, Dirut juga memberikan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Perbankan nasional banyak menghadapi kendala tantangan kredit macet dan terjadinya kasus *fraud* baik di bidang kredit maupun operasional yang melibatkan pihak internal Bank.
 - b) Pertumbuhan kredit Bank menunjukkan *trend* menurun akibat faktor ekonomi yang belum kondusif dan kendala yang terjadi pada proses internal.
 - c) Persoalan rasio NPL yang tinggi dan berpotensi meningkat, khususnya dari perusahaan *Multi Finance* perlu dilakukan upaya penyelesaian secara serius.
 - d) Upaya peningkatan sistem pengendalian internal dan peningkatan Strategi *Anti Fraud* untuk mencegah terulangnya kembali kasus *fraud*.

b. *Sense of Belonging*

Manajemen menyadari bahwa kekompakan dan kebersamaan serta rasa saling memiliki (*sense of belonging*) terhadap Bank dirasa merupakan suatu hal yang penting yang menjadi pendorong sikap saling menjaga dan memelihara semua *asset* Bank, baik itu yang bernilai material maupun non material (Reputasi, *Good Will*).

Dalam rangka menjalin kebersamaan di kalangan karyawan, Bank mengadakan Buka Puasa Bersama pada tanggal 16 Juni 2017. Pada tanggal 16 s.d 17 September 2017 Bank melaksanakan *employee gathering* bertempat di kota Malang. Acara tersebut dikemas dalam bentuk *out bond* berupa Kerja Sama *Team Work* dalam Mencapai *Goal*, dan Peragaan busana daerah oleh karyawan. Bank juga menyelenggarakan Perayaan Natal pada tanggal 21 Desember 2017. Dalam acara tersebut Pengurus senantiasa mengingatkan agar semua karyawan bekerja dengan baik dan menghindari perilaku negatif di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor. Dengan adanya penyelenggaraan acara di atas diharapkan rasa saling memiliki (*sense of belonging*) terhadap Bank semakin meningkat dan akan mendorong terwujudnya sikap saling menjaga dan memelihara seluruh *asset* Bank, kerja sama dan koordinasi antar unit kerja semakin baik sehingga mendorong kearah pencapaian kinerja Perseroan yang semakin baik.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi membentuk:

a. *Internal Audit Group*

Internal Audit Group bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. *Internal Audit Group* dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.

c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; dan
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- a. Komite Kredit;
- b. Komite Kebijakan Perkreditan Bank;
- c. ALCO;
- d. Komite IT *Steering*;
- e. Komite Strategi *Planning & Budgeting*;
- f. Komite Sumber Daya Manusia.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 telah diadakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	12	12	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	12	12	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	12	12	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	12	12	100%

C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2017 telah diadakan 11 (sebelas) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	11	11	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	11	11	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	11	11	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	11	11	100%
5	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	11	8	73%
6	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	11	11	100%
7	Winadewi Hanantha	Komisaris	11	9	82%

- 000 -

BAB IV

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, diuraikan sebagai berikut:

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016, yang dihadiri sebanyak 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) Pemegang Saham Perseroan memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan, dilakukan dengan cara Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham. Saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 2.929.375.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham baru. Setiap Pemegang 1.000 Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.075 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp240 Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Jumlah dana yang diterima Perseroan dalam PUT II adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PUT II, seluruhnya digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan.

Jadwal Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT. Bank Ina Perdana Tbk

Aktivitas	Tanggal
1. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	4 November 2016
2. Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa keuangan	3 Februari 2017
3. Tanggal DPS yang berhak memperoleh HMETD (<i>Recording Date</i>)	16 Februari 2017
4. Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) – Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi – Pasar Tunai	10 Februari 2017 16 Februari 2017
5. Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) – Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi – Pasar Tunai	13 Februari 2017 17 Februari 2017
6. Tanggal Pencatatan Terakhir Dalam DPS Yang Berhak Atas HMETD	16 Februari 2017
7. Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	17 Februari 2017
8. Tanggal Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD di BEI	20 Februari 2017
9. Periode Perdagangan HMETD	20-24 Februari 2017
10. Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	20-24 Februari 2017
11. Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	22-28 Februari 2017
12. Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	28 Februari 2017
13. Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	1 Maret 2017
14. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Distribusi Saham hasil Penjatahan	3 Maret 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank sepanjang tahun 2017:

1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2016

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	4,00%
2	OCBC Securities Pte Ltd-Client A/C	790.000.000	Rp79.000.000.000	28,99%
3	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	20,00%
4	PT Indolife Pensiontama	470.092.720	Rp47.009.272.000	17,25%
5	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	498.514.000	Rp49.851.400.000	18,29%
6	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	285.970.000	Rp28.597.000.000	10,49%
7	Masyarakat	26.384.352	Rp2.638.435.200	0,98%
Total		2.725.000.000	Rp272.500.000.000	100,00%

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 1 Maret 2017 (setelah PUT II)

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	1,93%
2	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
3	PT Indolife Pensiontama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
4	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
6	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
7	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
8	Masyarakat	462.686.894	Rp46.268.689.400	8,19%
Total		5.654.375.000	Rp565.437.500.000	100,00%

PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk telah selesai pada tanggal 1 Maret 2017 dan OJK melalui Surat No. SR-56/PB.31/2017 tanggal 27 April 2017 Hal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal menyampaikan bahwa Hasil PUT II sebesar Rp.695.370.596.538,- (setelah dikurangi biaya emisi saham) dapat dibukukan sebagai Dana Setoran Modal, dan Bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Buku 2. Pasca pelaksanaan PUT II telah terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham Bank yang cukup signifikan, Perubahan tersebut terutama kepemilikan saham PT Philadel Terra Lestari dan Bpk Oki Widjaja yang semula masing-masing 20% dan 4% terdelusi sehingga masing-masing menjadi 9,64% dan 1,93%, sementara kepemilikan saham dari PT Indolife Pensiontama dan group usahanya (PT Samudera Biru dan PT Gaya Hidup Masa Kini) menjadi pemegang saham mayoritas dengan jumlah kepemilikan sebesar 51,46%.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Sehubungan hal tersebut OJK melalui Surat No. S-23/PB.3112/2017 tanggal 3 Mei 2017, meminta konfirmasi mengenai pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank.

Permintaan konfirmasi dari OJK, telah diberitahukan oleh Bank kepada PT Indolife Pensiortama. Melalui surat No. 030/IP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 PT Indolife Pensiortama memberi tanggapan bahwa PT Indolife Pensiortama bersedia sebagai PSP Bank. Sampai laporan ini selesai dibuat PSP Bank masih PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja, sedangkan PSPT adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja.

3. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 30 Juni 2017

Tidak ada perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank dari bulan Maret 2017 sampai akhir bulan Juni 2017

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	1,93%
2	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
3	PT Indolife Pensiortama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
4	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
6	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
7	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
8	Masyarakat	462.686.894	Rp46.268.689.400	8,19%
Total		5.654.375.000	Rp565.437.500.000	100,00%

4. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2017

Tidak ada perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank dari bulan Juni 2017 sampai akhir bulan Desember 2017

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	1,93%
2	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
3	PT Indolife Pensiortama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
4	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
6	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
7	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
8	Masyarakat	462.686.894	Rp46.268.689.400	8,19%
Total		5.654.375.000	Rp565.437.500.000	100,00%

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Bank Ina Perdana, bank lain maupun LKBB

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB *)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	0%	0%	0%	0%

Catatan : *) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dan Direksi Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2017

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	5.643	3	1.712
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	4	61	3	142
Total	4	5.704	3	1.854

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2017 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2017*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	4	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

*) Yang diterima secara tunai

D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel

Dalam tahun 2017 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2017					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	-	-	-	-	-	-

E. Share Option

Di dalam komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2017, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank. Adapun kepemilikan saham ini dilakukan melalui Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli Saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan Program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja dan kinerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik yang dapat dinikmati oleh *Stakeholders* Perseroan.

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi dalam tahun 2017

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	26.731	16.000	3.500	240/ibr	N.A
Total		26.731	16.000	3.500	240/ibr	N.A

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2017

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	16,87 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,56 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,01 x

G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2017

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2017	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	2 Orang

H. Remunerasi Yang Diberikan

Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2017

A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp6.139.918.561	
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

I. Informasi Kuantitatif Remunerasi

Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2017

Jenis Remunersi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
2. Saham / Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	-	-	-	-

Keterangan : *) Hanya untuk MRT

J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Dalam acara Raker yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, Pengurus Bank memberi pengarahan kepada Peserta Raker, antara lain:

1. *Risk awareness* harus ditingkatkan untuk mengantisipasi risiko terjadinya *fraud* melalui peningkatan monitoring oleh supervisor dan rekan kerja dalam aktivitas kerja harian. Potensi terjadinya *fraud* dapat dimitigasi melalui perbaikan etos kerja dengan memperbaiki aspek pengendalian intern dan temuan-temuan yang sering diungkap oleh *Internal Audit Group*.
2. Mengantisipasi terjadinya peningkatan *operational risk* dan maraknya kasus *fraud* di dunia perbankan, Pengurus berpesan agar proses *Know Your Employee* dapat ditingkatkan. Supervisor diharuskan untuk memperhatikan *life style* karyawan, meningkatkan sistem pengendalian *intern*, dan memastikan setiap karyawan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam bekerja.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan *BI Checking* kepada seluruh Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2017 antara lain:

1. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
2. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
3. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
4. Karyawan baru wajib menandatangani Kode Etik Perilaku Karyawan, Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Janji Karyawan dan Deklarasi Pernyataan Anti *Fraud*.
5. Dalam surat Pemberitahuan Penyesuaian Gaji Tahun 2017 serta Pemberian insentif tahun 2017, Direksi meminta semua karyawan dapat terus meningkatkan komitmen integritas yang tinggi, motivasi kerja dan menghindari *fraud* dalam bentuk apapun.

6. *Whistle Blower*

Whistle Blower sebagai Strategi deteksi *fraud* sebagaimana yang ada dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* dengan memberikan dorongan kesadaran kepada Pegawai dan Pejabat Bank untuk melaporkan *fraud* yang terjadi, menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan agar menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya Karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *Whistle Blower*).

7. Program *Surprise Audit*.

Internal Audit Group melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/ Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

8. Jenjang Karir

Terbuka kesempatan pengembangan karir di PT Bank Ina Perdana Tbk dimana hal ini diwujudkan melalui pemberian prioritas kepada karyawan untuk menduduki jabatan strategis. Contoh seperti ini kiranya dapat memberi dorongan kepada karyawan untuk senantiasa mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan tidak pesimis akan pengembangan karir di PT Bank Ina Perdana Tbk.

Sepanjang periode laporan ini, Bank telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian pada Periode Laporan ini masih ditemukan timbulnya *fraud* namun tidak sampai merugikan Bank secara materil, yang terjadi akibat kelemahan pengendalian *intern* di cabang:

1. Adanya penggunaan atribut Bank berupa Kop surat Bank yang digunakan oleh seorang mantan karyawan/marketing di Kantor Cabang Semarang untuk memperlancar kegiatan yang diduga atau patut diduga sebagai kegiatan penipuan.
2. Kelemahan aspek pengendalian *intern* di Kantor Cabang Semarang yang dapat terdeteksi dalam pelaksanaan audit oleh *Internal Audit Group* dimana Seorang karyawan unit kerja Legal tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dengan ditemukannya bahwa Yang bersangkutan tidak menyampaikan kepada pejabat/komite kredit adanya rekayasa kredit; memberikan informasi palsu terhadap Komite Kredit dan *Reviewer*, terkait dengan appraisal jaminan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Jumlah internal *Fraud* tahun 2017

Penyimpangan <i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

K. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2017 Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	1*)	1**)
Total	1	1

*) Adanya gugatan Perdata dimana Bank Ina sebagai tergugat II.

***) Bank Ina melaporkan Mantan karyawan Bank Ina ke Polrestabes Semarang dengan sangkaan Penggelapan/Memalsukan dalam Jabatan.

Sebagaimana disampaikan dalam laporan periode sebelumnya bahwa ada Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Untuk memitigasi risikonya maka pada akhir bulan Desember 2012, Bank telah mencadangkan dana sebesar Rp1.419.039.389 yakni 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan PPA. Sepanjang tahun 2017 tidak ada penagihan dari Pihak PPA, namun demikian Bank masih tetap membukukan dana tersebut di atas dalam bentuk cadangan, sebagai langkahantisipasi bilamana kesepakatan dengan PPA dapat tercapai pada tahun 2018. Dengan adanya cadangan ini maka risiko dari tagihan PPA telah dapat di *cover* sepenuhnya.

L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

2. Direksi Bank beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Bisnis yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”. Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank Ina serta *intra news ina*.

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan : *) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

M. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* Bank

Sepanjang tahun 2017 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2017 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2017

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	15	137.015
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	9	535.222
	b. Grup	6	328.946

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

O. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

a. Strategi Perusahaan

- 1) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 1.

Proses tahapan Bank untuk menjadi Bank BUKU 2 telah dipercepat dari target semula tahun 2019, PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk telah selesai pada tanggal 1 Maret 2017, sejak tanggal 27 April 2017 Bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Buku 2

- 2) Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen resiko dan prosedur operasional.
- 3) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- 4) Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*.

b. Kebijakan dan strategi manajemen

1) Perspektif keuangan

- a) Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan *cost of fund* ideal.
- b) Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan pada peringkat PK-2 (Sehat).
- c) Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2%.
- d) Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio 12% - 14%.

2) Perspektif Pelanggan

- a) Pertumbuhan kredit komersial produktif dengan target minimal 55% dari total kredit, termasuk pencapaian pembiayaan UMKM minimal 20% dari total kredit.
- b) Perluasan *customer base funding*, khususnya potensi di kalangan sekolah/universitas Kristen yang tersebar luas di berbagai kota, yang saat ini baru terlayani 5% - 10%.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- c) Menjalinkan kerjasama dengan institusi sekolah/perusahaan untuk pengembangan kredit konsumsi (KTA, KPR dan KKB) dan pengembangan *wholesale banking* yaitu kemitraan dengan institusi keuangan sebagai penyeimbang pencapaian target kredit.
 - d) Meningkatkan kualitas layanan cabang (*service excellence*).
 - 3) Perspektif Proses Bisnis Internal
 - a) Penguatan *implementasi Good Corporate Governance* dan *Risk Management*, produktivitas karyawan dan budaya *Anti Fraud*.
 - b) Perbaikan *business process*, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan *product development process*.
 - 4) Perspektif Pengembangan
 - a) Program pendidikan – *Officer Development Program* (ODP).
 - b) Pembinaan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan *system informasi*.
2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 – 2019 diterbitkan bulan Nopember 2016.

a. Target Jangka Pendek (Tahun 2017)

Mempertimbangkan kinerja Bank pada semester I/2017 dan realisasi penambahan modal melalui *right issue* pada triwulan I/2017 serta kondisi perekonomian tahun 2017 yang belum sepenuhnya kondusif sehingga perlu dimitigasi dengan baik, maka kegiatan usaha semester II/2017 tetap konservatif berpedoman pada tema “*sustainable and quality growth*” dengan pertumbuhan kredit sebesar 22%.

Sesuai dengan arah bisnis jangka panjang (*corporate plan*) Pemegang Saham Pengendali, pada tahapan ini akan dilakukan pengembangan transformasi infrastruktur informasi teknologi, dimana setelah *stabilization period core banking system* Temenos T24 dilalui, maka akan dilakukan pengembangan untuk produk perbankan berbasis *internet*.

1) Target Finansial

- a) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp237,27 miliar menjadi Rp1,86 triliun pada akhir Desember 2017, tumbuh 15% dibanding posisi realisasi akhir Mei 2017.
- b) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp274,08 miliar menjadi Rp1,50 triliun, tumbuh 22% dari posisi realisasi akhir Mei 2017, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) mencapai 80%, dan porsi kredit kepada sektor UMKM mencapai 34% dari total portfolio kredit.
- c) Pertumbuhan total *asset* sebesar Rp253,33 miliar menjadi Rp3,09 triliun di Desember 2017.
- d) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp15,09 miliar dengan pembentukan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk kredit sebesar Rp28,67 miliar di Desember 2017.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

2) Target Non Finansial

a) Target Bisnis

- i. Pemberian kredit untuk tahun 2017 diarahkan ke sektor komersial produktif dengan target 80% dan sisanya 20% untuk konsumsi. Bisnis konsep B2B atau *wholesale banking* melalui kerjasama dengan *Multi Finance* mulai dikurangi, sedangkan kerjasama dengan Koperasi, Perusahaan Ventura dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya dalam kaitan pembiayaan usaha-usaha kecil dan mikro produktif akan dikembangkan.

Pengembangan kredit baru yang terus dirintis adalah kredit mikro untuk pedagang ritel melalui kerjasama dengan pedagang grosir dan kredit konsumsi seperti KTA, KPR, KKB dan kredit multiguna yang dikembangkan melalui program "*Corporate Partnership*". Sebagai tahap awal untuk penjangkauan, Bank telah bekerjasama dengan perusahaan Indogrosir untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dalam bentuk pemberian kredit mikro. Untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro, jumlah *outlet* yang bekerja sama akan ditingkatkan di tahun 2017.

- ii. Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyedia layanan seperti *pick up service*.
- iii. Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
- iv. Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.

b) Operasional

- i. Pencapaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (Sehat) secara berkesinambungan.
- ii. Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktifitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan secara berkelanjutan pada kebijakan dan prosedurnya.
- iii. Memperkuat *risk control system* dengan prioritas untuk akvifitas perkreditan dengan IT.
- iv. Menyempurnakan kebijakan-kebijakan di bidang operasional, perkreditan, dan kepatuhan yang merupakan konsekuensi sebagai perusahaan terbuka.

c) Sumber Daya Manusia

- i. Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat dalam kaitan pengembangan persiapan bisnis model baru, khususnya ketersediaan kompetensi bidang SDM dan IT.
- ii. Meneruskan *Up Dating Job Description* dan *Job Requirment* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- iii. Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan dengan *size* bisnisnya agar mampu mengantisipasi risiko operasional maupun risiko kredit.
 - iv. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi *assesment* dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, dan segi administrasi dan sistem informasi.
- d) Lain-lain
- i. Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
 - ii. Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem *scoring* penilaian audit.
 - iii. Melakukan relokasi Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) dan Kantor Pusat Operasional (KPO) agar mampu memberikan *branding* baru.
 - iv. Menambah modul aplikasi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan *debit card* baik sebagai *issuer* maupun *acquirer*.
 - v. Menambah mitra kerja sama pembayaran melalui layanan *virtual account*.
 - vi. Meningkatkan layanan kepada nasabah melalui *internet banking* dan *mobile banking*.
 - vii. Meluncurkan produk *e-money* untuk komunitas sekolah dan *suporter* klub sepak bola.
 - viii. Menjadi penyelenggara Laku Pandai untuk menjaring nasabah mikro.
 - ix. Menjadi Bank Devisa sehingga dapat melayani penyimpanan dana dalam valuta asing, pemberian kredit dalam valuta asing dan jasa perbankan lainnya dalam valuta asing.
 - x. Menambah mesin-mesin ATM di kantor Bank, sekolah/universitas serta lokasi lain yang sudah bekerjasama dengan Bank.
 - xi. Membuka *payment point* dan kantor kas di toko-toko Indogrosir dalam rangka mengembangkan kredit mikro untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir.
 - xii. Meningkatkan layanan *call center* untuk memberikan dukungan atas produk-produk yang diterbitkan Bank.
- b. Target Jangka Menengah (Tahun 2018 – 2019)
- Target jangka menengah ke depan diarahkan pada perwujudan bisnis baru sebagai Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksi (*transactional banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi. Sistem aplikasi yang dimiliki dapat menunjang kerja sama dengan perusahaan/ institusi yang memiliki kinerja baik (*Corporate Partnership*) seperti *Virtual Account*, *Card Based Transaction*, *Debit Card*, *Pre-loaded Card* dan *Internet Banking*.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Target Finansial dan Non Finansial

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp2,13 triliun di tahun 2018 dan menjadi Rp2,39 triliun di tahun 2019.
- 2) Meningkatkan kredit diberikan menjadi Rp1,74 triliun di tahun 2018 dan menjadi Rp2,01 triliun di tahun 2019.
- 3) Total aset ditargetkan di tahun 2018 sebesar Rp3,39 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp3,69 triliun.
- 4) Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2018 dan 2019 masing-masing diperkirakan sebesar Rp27,49 miliar dan Rp38,63 miliar.
- 5) Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- 6) Memperluas layanan perbankan berbasis digital.
- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- 8) Memperluas pengenalan *corporate brand image*.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik tercermin pada komitmen PSP/PSPT untuk memperkuat permodalan bank melalui Aksi Korporasi berupa PUT II yang telah selesai pada tanggal 1 Maret 2017. Sejak tanggal 27 April 2017 Bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Buku 2.

P. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka kepada *Stakeholders*, maka pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 bertempat di Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Tower II Jl. Jendral Sudirman Kav, 52-53 Jakarta, Bank menyelenggarakan *Public Expose* dengan materi Hasil Kinerja Bank Tahun 2016.

Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik juga dilaksanakan oleh Bank yakni Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II PT. Bank Ina Perdana Tbk.

Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, pada tanggal 7 Desember 2017 Bank bekerja sama dengan PT Dana Mandiri Sejahtera mengadakan kegiatan CSR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

di Kantor Kecamatan Balaraja, Jl Raya Serang Km 23 Tangerang, untuk berpartisipasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki usaha kecil produktif dan juga kepedulian Bank untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup para *end user* yang disempurnakan dengan pelaksanaan Program Kebijakan Pemerintah Nawacita serta implementasi Program Edukasi Literasi dari OJK. Tema acara CSR tersebut adalah "Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Inovasi Usaha Dari Para Wanita Produktif". Dalam acara ini, Bank memberikan bantuan dalam bentuk bingkisan kepada 90 (sembilan puluh) orang *end user* dari mitra Bank - PT Dana Mandiri Sejahtera masing-masing berupa 30 unit kompor gas 2 tungku, 30 unit *water dispenser hot & cold* dan 30 unit *blender* gelas kaca. Penerima bantuan ini adalah wanita yang memiliki usaha di bidang sektor mikro produktif dan memiliki reputasi baik sebagai nasabah PT Dana Mandiri Sejahtera. Dengan pemberian bingkisan ini, diharapkan penerima bingkisan dapat meningkatkan produktifitasnya di waktu yang akan datang.

Selain kegiatan CSR yang disebut di atas, Bank juga ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas & Mahasiswa antara lain:

1. Kegiatan Reboisasi yang dilakukan Palama – FE UKI pada tanggal 16 s.d 19 Agustus 2017, di Dukuh Tritis Desa Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali, Jawa timur.
2. Ukrida *National Accounting Challenge* 2017 yang diselenggarakan tanggal 6 s.d 8 September 2017, di Kampus Ukrida 1 Jakarta Barat.
3. Seminar Nasional "Peran Penting *Team Engagement* dan *Customer Engagement* dalam upaya meningkatkan *Branch Service Quality*" pada tanggal 28 s.d 30 September 2017.
4. Seminar BKS Dana Pensiun Kristen Indonesia "Meningkatkan Profesionalisme Dalam Mengelola Dana Pensiun" pada tanggal 18 s.d 20 September 2017 di Bali.
5. Ukrida *Golf Tournament* yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2017.
6. *Cleement Suleeman Scholarship Fund* yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2017 di Ukrida Jakarta.
7. Seminar "Let's Build Economic & Business With Technology Digital" yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2017 di Gedung Graha William Soeryadjaya – Kampus UKI.

- 000 -

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2017 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Dalam tahun 2017, Otoritas mengenakan sanksi kepada Bank Ina sebesar Rp30.202.000 yakni: Rp202.000 dikenakan BI disebabkan ada dua transaksi kliring kredit tidak sesuai dengan ketentuan; OJK mengenakan denda sebesar Rp15.000.000 sebagai akibat terlambat menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Pengawas OJK; dan OJK mengenakan denda sebesar Rp15.000.000 sebagai akibat tidak menyampaikan Laporan Transaksi antara Bank dan Pihak-pihak berelasi.

Dalam rangka meningkatkan Fungsi Kepatuhan guna meminimalisir pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lain, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan bidang operasional sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih baik. Pelatihan dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Pelatihan secara internal dapat dilakukan oleh pengajar internal. Peningkatan kemampuan SDM juga dilakukan melalui rapat-rapat operasional.

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan *training*, Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kepatuhan, antara lain:

- a) Dalam rangka meningkatkan *Sense of Business* dan *Think Like Owner*, maka pada hari Sabtu & Minggu tanggal 25 s.d 26 November 2017 Bank menyelenggarakan Training “*Building Business Acumen*”, bertempat di Hotel Puri Denpasar, Jl Denpasar Selatan No. Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- b) Bank menyelenggarakan pembekalan kepada karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.
 - c) Untuk meningkatkan pemahaman terkait kerjasama *bancassurance* dengan PT A.J Central Asia Raya, maka pada tanggal 28 Oktober 2017 diselenggarakan Training “*Relationship Officer*” bertempat di Redtop Hotel & Convention Center, Jl Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat.
 - d) Pada tanggal 21 Desember 2017 Semua Pengurus Bank, *Group Head* dan Kepala Unit Kerja di KPNO mengikuti *In House Training* PSAK 71.
 - e) Selain sertifikasi Manajemen Risiko, Bank juga telah mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti sertifikasi bidang *compliance* dan *treasury*.
 - ~ Saat ini Direktur Kepatuhan serta 2 (dua) orang Pegawai di Satuan Kerja Kepatuhan 2 (dua) telah mengikuti Sertifikasi dan memiliki Sertifikat Kepatuhan.
 - ~ Sebagaimana yang diwajibkan PBI No.19/5/PBI/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar dan PADG No.19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, maka Bank telah mendaftarkan 2 (dua) orang Pegawai Bank dan 1 (satu) orang Direksi menjadi Anggota Asosiasi Tresuri. Pada tanggal 28 Oktober 2017 Satu orang Pegawai yang didaftarkan menjadi Anggota Asosiasi Tresuri telah memiliki Sertifikat Kompetensi *Treasury Level Basic* dari LSPP.
2. Unit Kerja kepatuhan pada setiap akhir bulan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. guna mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya. Melalui penerbitan memo ini, unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.
3. Peningkatan Bidang SDM dalam upaya peningkatan *control* telah dilakukan melalui:
- a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan *training*, Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Kepatuhan dan pelaksanaan *assessment* calon pimpinan.
 - b. Untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam bekerja, sehingga setiap karyawan dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja, maka dalam periode laporan ini Kebijakan dan prosedur terus dikembangkan, dievaluasi, di-*review* terutama sisdur operasional untuk menyesuaikan dengan penggunaan *core banking system* yang baru.
 - c. Peningkatan *Internal Control* melalui:
 - 1) Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan.
 - 2) Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
 - 3) *Know Your Employee*.
- Unit Kerja HRD meminta bantuan Unit Kerja *Loan Admin* perusahaan melakukan BI *Checking* khususnya kepada Pejabat Bank, sebagai upaya

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

deteksi dini guna mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman karena dapat memengaruhi perilaku dalam bekerja.

4) Arahan Pengurus Bank

Dalam rangka menjalin kebersamaan di kalangan karyawan, Bank mengadakan Buka Puasa Bersama pada tanggal 16 Juni 2017. Pada tanggal 16 s.d 17 September 2017 Bank Ina Perdana telah melaksanakan *employee gathering* bertempat di kota Malang. Acara tersebut dikemas dalam bentuk *out bond* berupa Kerja Sama *Team Work* dalam *Mencapai Goal*, dan Peragaan busana daerah oleh karyawan. Bank juga menyelenggarakan Perayaan Natal pada tanggal 21 Desember 2017. Dalam acara tersebut Pengurus Bank memberi arahan agar semua karyawan bekerja dengan baik dan menghindari perilaku negatif di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.

5) *Surprise Audit*

Dalam tahun 2017, *Internal Audit Group* tetap melakukan *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja karena dirasakan bahwa *surprise audit* merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya *fraud*. Rencana *surprise audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

6) Pengembangan *data based* SDM dengan sasaran untuk memudahkan bagi karyawan mendapatkan informasi langsung terkait SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

4. Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, maka Unit Kerja Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
5. Untuk lebih mengefektifkan penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, Informasi, dll kepada karyawan, selain disampaikan dalam bentuk *hard copy* di sajikan juga dalam *intra news* Bank Ina.
6. Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh Unit Kerja Kepatuhan.
7. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, dibahas dalam rapat tersendiri. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Unit Kerja Kepatuhan.
8. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan.
9. Untuk meningkatkan rasa aman bekerja Karyawan, maka Bank menambah nilai Perlindungan Sosial kepada Karyawan, dimana selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Karyawan juga didaftarkan mengikuti asuransi kesehatan pada PT *Avrist Assurance*.
10. Setelah Temenos T 24 *Banking System* efektif diimplementasikan training masih berlanjut sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

11. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum, Unit Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan tentang Visi dan Misi Kepatuhan, yang merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari *Internal Audit Group* yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil *Internal Audit Group* sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang *Internal Audit Group Head* dan 3 (tiga) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, *Internal Audit Group* telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Group* berupa *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang atau Unit kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan *Internal Audit Group* telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara periodik kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2017 disampaikan melalui surat No.OJK/DIR/040/0218 Tanggal 21 Februari 2018, sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2017 disampaikan melalui surat No.OJK/DIR/134/0817 Tanggal 23 Agustus 2017.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Laporan Hasil kaji Ulang SKAI Periode Juli 2014 s/d Juni 2017 oleh KAP Djoko, Sidik, Indra & Rekan, telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/139/0817 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Kaji Ulang SKAI oleh Pihak Ekstern,

C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk yang berakhir 31 Desember 2016, Bank menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dan telah

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

menyampaikan *management letter* secara tepat waktu melalui Surat NO.02399/PSS-AS/2017 tanggal 27 April 2017. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak objektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam Rapat Komite Audit tanggal 5 September 2017, dilakukan pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana Tbk, dari hasil pembahasan tersebut Komite Audit menyarankan kepada Dewan Komisaris bahwa pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun buku 2017 dikerjakan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja. Dengan adanya rekomendasi dari Komite Audit maka untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk yang berakhir 31 Desember 2017 Bank menggunakan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja.

D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain *Internal Audit Group*, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan *Anti Conflict of Interest*. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

Pada tanggal 5 Mei 2017 Bank melaksanakan *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko dengan Topik "*Relationship Lending Technology*" dengan nara sumber dari Eksternal, diikuti oleh Direksi, Komisaris, *Group Head* dan Pimpinan KC/Capem dan Pimpinan Unit Kerja.

- 000 -

BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA POSISI AKHIR DESEMBER 2017

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank, sebagaimana surat dari OJK No. S-47/PB 311/2016 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana.
2. Penguatan Permodalan
 - a. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank.

Hasil RUPS Tahunan 2016, yang diselenggarakan tanggal 29 Mei 2017 diantaranya memutuskan Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp18.236.181.629 dengan rincian sebagai berikut:

 - 1) Sebesar 20 % laba bersih senilai Rp3.647.236.326, akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp14.588.945.303 sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
 - b. PUT II selesai pada tanggal 1 Maret 2017. Pada tanggal 27 April 2017, OJK telah memberi persetujuan hasil PUT II setelah dikurangi biaya emisi saham dapat dibukukan sebagai Dana Setoran Modal dan Bank masuk dalam Kategori Bank BUKU 2.
3. Dalam upaya mewujudkan bisnis berbasis teknologi berupa “*Digital Banking*” maka Efektif tanggal 5 Juni 2017 Bank menggunakan Temenos T24 sebagai *core banking system*. Saat ini Bank sedang mengajukan Permohonan Izin sebagai Penerbit dan *Acquirer* Kartu Debet. Bank juga sedang mengajukan Penerbitan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
4. Jaringan Kantor
 - a. Pembukaan Kantor Cabang (KC) Bali

Permohonan Pembukaan KC Bali telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-103/PB.12/2017 tanggal 28 April 2017. Pada tanggal 7 Juni 2017 KC Bali resmi dibuka beralamat di Jl Gatot Subroto No. 334 Denpasar – Bali.
 - b. Pembukaan KC Makassar

Permohonan Izin Pembukaan KC Makassar disetujui oleh OJK melalui surat No. S-316/PB.12/2017 tanggal 12 September 2017. Pada tanggal tanggal 18 Oktober 2017 KC Makassar resmi dibuka beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.1H Rt.001 Rw.05, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Makassar Sulawesi Selatan.
 - c. Pembukaan KC Malang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Permohonan Izin Pembukaan KC Malang disetujui oleh OJK melalui surat No. S-371/PB.12/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Pada tanggal 23 November 2017 KC Malang resmi dibuka beralamat di Jl. Letjen. S. Parman No 47A, Kel. Purwanto, Kec. Blimbing, Malang Jawa Timur.

d. Penutupan KC Lumajang:

Permohonan Persetujuan Prinsip Penutupan KC Lumajang diajukan Bank tanggal 2 Agustus 2017 dan OJK memberi Persetujuan Prinsip Penutupan KC Lumajang tanggal 8 Agustus 2017. Dengan adanya persetujuan prinsip penutupan, maka Bank menyampaikan Permohonan Persetujuan Penutupan KC Lumajang dan OJK memberi persetujuan melalui surat No. S-411/PB.12/2017 tanggal 7 Desember 2017.

e. Relokasi KC Semarang

Pada tanggal 13 November 2017, Bank mengajukan Permohonan Izin Pemindahan KC Semarang yang semula beralamat di Komplek Pertokoan DP Mall, Pemuda Mas Blok A3, Jl. Pemuda No. 150 Semarang Jawa Tengah, menjadi beralamat di Jl. Depok No. 38D, RT 001, RW 003, Kel. Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Semarang Jawa Tengah Lokasi KC yang baru berada ± 1 Km dari lokasi lama.

5. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
6. *Internal Audit Group*, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
12. Di bawah kepemimpinan Bp. Edy Kuntardjo beserta Jajaran Pengurus lainnya, Bank mampu menunjukkan prestasi di dunia Perbankan Nasional. Nama dan reputasi Bank semakin dikenal di dunia perbankan nasional, telah menjadi perusahaan “*Go Public*” yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Januari 2014, dan masuk Bank Kategori BUKU 2 Pada tanggal 27 April 2017. Selain itu Bank juga menunjukkan prestasi dalam berbagai *event* yang diselenggarakan oleh pemingkat prestasi.

Sepanjang tahun 2017 ada 5 (lima) penghargaan yang diterima Bank, yakni :

- a. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship* sebagai *Best Financial Sector Mid Cap*.
- b. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship* sebagai *Top 50 of Mid Market Capitalization Public List Companies*.
- c. Pada tanggal 10 Agustus 2017 menerima penghargaan dari Info Bank berupa Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.
- d. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* sebagai *Top Leader On CSR Commitment*.
- e. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* sebagai *Top CSR on SDGs Woman Entrepreneur Program*.

Beberapa penghargaan lainnya yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun belakangan:

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia *Banking Award* sebagai *Most Efficient Bank* Kategori Bank Buku 1.
- b. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan dari *Indonesian Banking Award Tempo Media Group* sebagai *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- c. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan dari Infobank berupa Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015.
- d. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan sebagai *The Best Performing Bank of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award 2016*.
- e. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai *The Top 3 Best Banks*.
- f. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- g. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- h. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- i. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015* sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.
- j. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category* “*The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014*”.
- k. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 CEO in Leadership”.
- l. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank of The Year 2013*.
- m. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional:
 - ~ Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - ~ Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Risk Management”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
 - ~ Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Marketing”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
- n. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

Jakarta, 23 April 2018
PT Bank Ina Perdana Tbk



Birawa Natapradja
Komisaris Utama Independen

Edy Kuntardjo
Direktur Utama

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk

Posisi : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank Ina Perdana (“Bank”), disimpulkan Pelaksanaan GCG memperoleh peringkat 2 (dua) atau “Baik”. dengan pertimbangan bahwa Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.2. Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.<ol style="list-style-type: none">a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.b. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau		

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Pemegang Saham Pengendali (PSPT) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.

- c. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- d. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- e. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- f. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- g. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- h. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- i. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- j. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- k. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Melalui Surat No. S-47/PB 311/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank Ina Perdana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa susunan Pengurus PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis

3. Penguatan Permodalan

- a. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank. Hasil RUPS Tahunan 2016, yang diselenggarakan tanggal 29 Mei 2017 diantaranya memutuskan Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp18.236.181.629 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.) Sebesar 20 % laba bersih senilai Rp3.647.236.326, akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2.) Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp14.588.945.303 sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
- b. PUT II telah selesai pada tanggal 1 Maret 2017. Melalui Surat No. SR-56/PB.31/2017 tanggal 27 April 2017 Hal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal, OJK telah memberi persetujuan hasil PUT II setelah dikurangi biaya emisi saham dapat dibukukan sebagai Dana Setoran Modal.

4. Pembukaan KC Bali; KC Makassar; menambah jumlah jaringan kantor Bank serta Relokasi KC Lumajang ke Malang dan Relokasi KC Semarang, diyakini akan memperluas jangkauan bisnis Bank.
5. Efektif tanggal 5 Juni 2017 Bank menggunakan Temenos T24. Dalam upaya mewujudkan bisnis berbasis teknologi berupa “*Digital Banking*” maka saat ini Bank sedang mengajukan Permohonan Izin sebagai Penerbit dan *Acquirer* Kartu Debet, dan telah ditanggapi oleh Bank Indonesia dengan melakukan *On Site Visit* pada tanggal 8-10 November 2017 dan 13 November 2017, hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti Bank pada tanggal 16 Januari 2018, Bank juga sedang mengajukan Penerbitan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* dan telah ada komunikasi dengan OJK terkait hal tersebut dan masih ada yang perlu ditindaklanjuti.
6. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, maka pada periode Laporan Semester II/2017, telah dilakukan juga :
 - a. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
 - b. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017

- c. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.
- d. Dalam surat Pemberitahuan Penyesuaian Gaji Tahun 2017 Direksi meminta kepada seluruh karyawan, komitmen integritas tinggi dan menghindari *Fraud* dalam bentuk apapun.
- e. Program *Surprise Audit*

Internal Audit Group tetap melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja karena dirasakan bahwa *Surprise Audit* merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya *Fraud*. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh *Internal Audit Group Head* dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

- f. Sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja, maka perusahaan melakukan *BI Checking* kepada Karyawan/Calon Karyawan.
- g. Karyawan baru diharuskan menandatangani Kode Etik Perilaku Karyawan, Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Janji Karyawan, dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.

7. Selama periode Laporan Bank, senantiasa mampu menjaga ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Periode Laporan ini masih dijumpai adanya pengenaan denda. OJK melalui Surat No.38/PB 3112/2017 tanggal 19 Juli 2017 Perihal Laporan Publikasi Tahunan dan *Management Letter* Tahun 2016, mengenakan denda sebesar Rp15.000.000 sebagai akibat terlambat menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Pengawas OJK; Surat No. S-54/PB.3112/2017 tanggal 18 September 2017 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Posisi Triwulan I 2017, OJK mengenakan denda sebesar Rp15.000.000 sebagai akibat tidak menyampaikan Laporan Transaksi antara Bank dan pihak-pihak berelasi.

Di tengah kondisi perekonomian yang masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan Bank senantiasa berupaya dengan seoptimal mungkin agar pencapaian kinerja tetap konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pencapaian *Business Plan Bank* hingga akhir bulan Desember 2017 adalah perolehan Profit tercapai 121,55%, *Funding* tercapai 101,52%, dan total *Asset* tercapai 101,00%, sementara *Lending* tercapai 97,69% dari target yang ditetapkan.

Jakarta, 24 Januari 2018
PT Bank Ina Perdana Tbk



Wardoyo
Direktur Kepatuhan